

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

PERUBAHAN RENCANA RENJA
KECAMATAN PANCUR
TAHUN 2025



**KECAMATAN PANCUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025. Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Pancur Tahun 2023 berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 s.d 2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Pancur Tahun 2023 dan 2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 1 Juli 2025

Pt. CAMAT PANCUR

KARTIMAN SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761225 201001 1 017

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
	DAFTAR TABEL.....	iv
	DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. SistematikaPenulisan.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PANCUR TRWULAN I TAHUN 2025	10
	2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Pancur	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancur	2
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec.Pancur	23
	2.4. Rivew Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	25

BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANCUR	33
BAB	IV	PENUTUP.....	41
		4.1 Catatan Penting.....	41
		4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	42
		4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang s/d Triwulan II (Semester 1)tahun 2024	13
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Sampai dengan Triwulan I tahun 2025.....	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancur Kab. Rembang Triwulan IITahun 2025	24
Tabel 2.4	Rivew Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pancur Kab.Rembang Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Kerja,Kegiatan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya insepisi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Perubahan Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
13. Perbup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025
14. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/0632/2025 tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 Kab.Rembang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang tahun 2025 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tahun 2025 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA - PPAS) Tahun 2025;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan berserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pancur

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANCUR

Bab ini memuat tentang Sumber Pendanaan Kecamatan Pancur

BAB IV. PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 untuk memperoleh gambaran dan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pancur akan memberikan gambaran capaian output dan outkam atas satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang selama kurun waktu sampai dengan triwulan I tahun 2025. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator- indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun

sasarannya.

7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	12	12	0	-	0	-
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	2	0.02	20	0.20
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	12	2	0.17	20	1.67
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	12	0	-	0	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	100	100	36	0.36	36	0.36
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	-	0	-
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	0	-	0	-
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1		-		-
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1		-		-
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	0	-	0	-

7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	0	-	0	-
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	70	70	70	0	-	0	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	3	1.5	0.50	1.5	0.50
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	75	0.75	75	0.75
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	0	-	0	-
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	5	0.42	5	0.42
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	8	0.67	8	0.67
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondidi Baik	85	85	85	0	-	0	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	16	16	0	-	0	-

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	16	0	-	0	-
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2				-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	100	100		-		-
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100		-		-
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12		-		-
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100		-		-
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	4	4		-		-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	99,29	99,29	99,29	47	52,29	47	1.00

						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	4	4	4		-		-
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	95	95	95	50	0.53	50	0.53
						Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ TEpat Waktu							
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	6	6	6	5	0.83	5	0.83
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	6	6	4	0.67	4	0.67
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,29	92,29	92,29	46	46,29	46	46,29
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	50	0.50	50	0.50
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23	23	23	12	0.52	12	0.52
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,62	98,62	98,62		-		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100	100	100		-		-
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100	100		-		-

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	85	85	85	40	0.47	40	0.47
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-Rata IKM Desa	76	76	76	35	0.46	35	0.46
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	4	4	2	0.50	2	0.50

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan I Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025						
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)				
7												
7	01							2,221,695,900	1,080,841,674	48.65%		
7	01	01										
7	01	01	2.01									
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	-	361,000	-	0.00%
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	0	-	361,000	-	0.00%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	52	0.52	2,045,484,000	995,364,562	48.66%
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	1.00	1,982,724,000	979,524,562	49.40%
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	6	0.50	62,760,000	15,840,000	25.24%

7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	0	-	-	-	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	2	0.02	1,484,000	300,000	20.22%
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	2	0.17	1,484,000	300,000	20.22%
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	0	-	-	-	0.00%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	36	0.36	10,650,400	3,838,200	36.04%
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	-	1,650,000	-	0.00%
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	-	-	-	

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		-	-	-	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		0,1	2,111,200	280,200	13.27%
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	0				
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0,5	0,5	6,889,200	3,558,000	51.65%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	-	-	-	0.00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	70	0	-	15,000,000	-	0.00%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	1.5	0.50	15,000,000	-	0.00%

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	75	0.75	40,875,000	20,398,112	49.90%
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	-	-	-	0.00%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5	0.42	24,000,000	5,355,936	22.32%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	0.67	16,875,000	15,042,176	89.14%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondidi Baik	85	0	-	7,000,000	2,357,500	33.68%
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	0	-	7,000,000	2,357,500	33.68%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	0	-	-	-	

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2				-	-	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100			-	4,041,000	-	0.00%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100			-	2,166,000	-	0.00%
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12			-	2,166,000	-	0.00%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100			-	1,875,000	-	0.00%
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4			-	1,875,000	-	0.00%

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	99,29	47	52,29	64,008,900	42,953,300	67.11%
						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	4		-			0.00%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	95	50	0.53	64,008,900	42,953,300	67.11%
						Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu						
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	6	5	0.83	21,015,800	18,203,300	86.62%
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	4	0.67	42,993,100	24,750,000	57.57%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,29	46	46,29	24,160,000	13,380,000	55.38%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	50	0.50	24,160,000	13,380,000	55.38%
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23	12	0.52	24,160,000	13,380,000	55.38%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,62			-	2,600,600	-	0.00%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100			-	2,600,600	-	0.00%
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100			-	2,600,600	-	0.00%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	85	40	0.47		5,670,000	2,250,000	39.68%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-Rata IKM Desa	76	35	0.46		5,670,000	2,250,000	39.68%
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	2	0.50		5,670,000	2,250,000	39.68%

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisiensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancur

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi atau tidak memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan data realisasi target kinerja sampai dengan tahun 2024. Adanya faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan berdasarkan data realisasi target kinerja tahun 2024, lalu terjadi implikasi yang timbul pada renstra 2021-2026 kebijakan perencanaan yang perlu diambil pada anggaran tahun 2025 berdasarkan realisasi tahun 2024 dan realisasi triwulan I tahun 2025 untuk mengatasi hambatan-hambatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec. Pancur

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Pancur harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara

independen,obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan public meningkatkan kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Renstra 2021-2026														
	Indeks Pelayanan Publik/IPP			3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,27	4,39	4,47	Na	5,0	5,5	
	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM			85	86	87	88	89	85,03	84,86	89,72	Na	90,00	91,00	

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2025. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan Perubahan diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2025

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	7				UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7	01			KECAMATAN			2,221,695,900	KECAMATAN					2,221,695,900	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Pa ncur	Nilai SAKIP OPD Kec. Pancur	73	2,121,215,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Pa ncur	Nilai SAKIP OPD Kec. Pancur	73	2,121,215,400	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	722,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	722,000	
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	361,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	361,000	
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	361,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	361,000	46

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	2,045,484,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	2,045,484,000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Pa ncur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	1,982,724,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Pa ncur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	1,982,724,000	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	62,760,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	62,760,000	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	-	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	1,484,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	1,484,000	
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	1,484,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	1,484,000	
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	-	

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Pemenuhan pelayanan umum	100	10,650,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Pa ncur	% Pemenuhan pelayanan umum	100	10,650,400	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,650,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,650,000	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	-	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2,111,200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2,111,200	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12		
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	6,889,200	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	6,889,200	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Pa ncur	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	70	15,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Pa ncur	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	70	15,000,000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	Pengadaan Mebel	Kec.Pa ncur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	

7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Pa ncur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Pa ncur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	15,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Pa ncur	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	40,875,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Pa ncur	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	40,875,000	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24,000,000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	16,875,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	16,875,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Pa ncur	% BMD Dengan Kondidi Baik	85	7,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Pa ncur	% BMD Dengan Kondidi Baik	85	7,000,000	

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	7,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	7,000,000	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Pa ncur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Pa ncur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	-	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Pa ncur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Pa ncur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Pa ncur	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	4,041,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Pa ncur	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	4,041,000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Pa ncur	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	2,166,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Pa ncur	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	2,166,000	

7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	2,166,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	2,166,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Pa ncur	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	1,875,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Pa ncur	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	1,875,000	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	1,875,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	1,875,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Pa ncur	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	99,29	64,008,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Pa ncur	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	99,29	64,008,900	
						Kec.Pa ncur	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	4			Kec.Pa ncur	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	4		

3	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Pa ncur	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	95	64,008,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Pa ncur	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	95	64,008,900	
							Kec.Pa ncur	Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ TEpat Waktu				Kec.Pa ncur	Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ TEpat Waktu			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Pa ncur	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	6	21,015,800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Pa ncur	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	6	21,015,800	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	42,993,100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	42,993,100	
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Pa ncur	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,29	24,160,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Pa ncur	Cakupan Penyelenggara n Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,29	24,160,000	
4	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pa ncur	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	24,160,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pa ncur	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	24,160,000	

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23	24,160,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Pa ncur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23	24,160,000
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Pa ncur	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,62	2,600,600	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Pa ncur	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,62	2,600,600
5	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Pa ncur	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100	2,600,600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Pa ncur	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100	2,600,600
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Pa ncur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	2,600,600	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Pa ncur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	2,600,600
	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Pa ncur	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	85	5,670,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Pa ncur	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	85	5,670,000
6	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Pa ncur	Rata-Rata IKM Desa	76	5,670,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Pa ncur	Rata-Rata IKM Desa	76	5,670,000
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	5,670,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	5,670,000
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	5,670,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Pa ncur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	5,670,000

Secara umum, rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Pancur pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANCUR

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pancur

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan public;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sebagai upaya mendorong profesionalisme;
4. Meningkatkan Jaminan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat;
6. Tertib Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Meningkatkan fungsi pemerintahan desa/kelurahan.

Setiap sasaran strategis Kecamatan Pancur dijabarkan lebih lanjut kedalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud tujuan dan karakteristik-karakteristik program.

Adapun sasaran yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Masyarakat penerima pelayanan;
2. Sarana pelayanan publik;
3. Rumah Dinas, gedung kantor, kendaraan operasional roda 4 dan roda 2;
4. Aparatur Kecamatan Desa;
5. PKK Kecamatan, Desa.

3.2 Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

Tahun 2025 adalah Tahun ke Empat Renstra Kabupaten Rembang periode 2021-2026. Renja Kecamatan Pancur kabupaten Rembang tahun 2025 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2025 secara rinci rumusan Program dan kegiatan kecamatan Pancur Kabupaten Rembang 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Terkait Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub.Kegiatan

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pancur Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indek Pelayanan Publik / IPP	Angka	3,27	4,39	3,1	3,2	3,3	3,45	Na
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Angka	85,03	84,86	85	86	87	88	89

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sb Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
																		Target Capaian Kinerja 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
																		Sebelum Perubahan	Perubahan	RKPD 2025					APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
7																										
7	01																									
7	01	01																								
7	01	01	2.01																							
7	01	01	2.01	0001																						
7	01	01	2.01	0007																						
7	01	01	2.02																							
7	01	01	2.02	0001																						
7	01	01	2.02	0003																						
7	01	01	2.02	0005																						

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Kec. Pancur	100	100	3,000,000	1,484,000	300,000			100	4,000,000
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Pancur	12	12	3,000,000	1,484,000	300,000	PAD		12	4,000,000
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Pancur	12	12	-	-		PAD		12	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	Kec. Pancur	100	100	20,862,000	10,650,400	12,925,400			100	24,700,000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pancur	1	1	1,000,000	1,650,000	1,650,000	PAD		1	1,500,000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Pancur	1	1	500,000	-		PAD		1	700,000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pancur	1	1	4,000,000	-		PAD		1	5,000,000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pancur	1	1	3,000,000	2,111,200	2,111,200	PAD		1	4,000,000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Pancur	12	12				PAD		12	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Pancur	1	1	8,362,000	6,889,200	9,164,200	PAD		1	8,500,000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pancur	12	12	4,000,000	-		PAD		12	5,000,000

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Kec. Pancur	70	70	18,000,000	15,000,000	5,000,000			70	18,000,000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Pancur			-	-		PAD			-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pancur	3	3	18,000,000	15,000,000	5,000,000	PAD		3	18,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pancur	100	100	89,300,000	40,875,000	65,700,000			100	92,300,000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pancur	12	12	200,000	-		PAD		12	300,000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pancur	12	12	19,800,000	24,000,000	19,500,000	PAD		12	22,000,000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pancur	12	12	69,300,000	16,875,000	46,200,000	PAD		12	70,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondidi Baik	Kec. Pancur	85	85	5,000,000	7,000,000	5,000,000			85	7,000,000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Pancur	16	16	4,000,000	7,000,000	5,000,000	PAD		16	5,000,000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Pancur	16	16	1,000,000	-		PAD		16	2,000,000

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pancur	2	2	-	-		PAD		2	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Kec. Pancur	100	100	5,000,000	4,041,000	-			100	6,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pancur	100	100	2,500,000	2,166,000	-			100	3,000,000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pancur	12	12	2,500,000	2,166,000	-	PAD		12	3,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	Kec. Pancur	100	100	2,500,000	1,875,000	-			100	3,000,000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Pancur	4	4	2,500,000	1,875,000		PAD		4	3,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Kec. Pancur	99,29	99,29	66,000,000	64,008,900	78,205,900			99,29	71,000,000
						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Kec. Pancur	4	4						4	

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	Kec. Pancur	95	95	66,000,000	64,008,900	78,205,900			95	71,000,000
						Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu	Kec. Pancur									
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Pancur	6	6	21,000,000	21,015,800	18,240,000	PAD		6	21,000,000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pancur	6	6	45,000,000	42,993,100	59,965,900	PAD		6	50,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pancur	92,29	92,29	35,000,000	24,160,000	26,535,000			92,29	30,000,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Pancur	100	100	35,000,000	24,160,000	26,535,000			100	30,000,000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pancur	23	23	35,000,000	24,160,000	26,535,000	PAD		23	30,000,000

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Kec. Pancur	85	85	6,000,000	5,670,000	8,670,000			85	7,000,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-Rata IKM Desa	Kec. Pancur	76	76	6,000,000	5,670,000	8,670,000			76	7,000,000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pancur	4	4	6,000,000	5,670,000	8,670,000	PAD		4	7,000,000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis untuk mereview renja OPD Kecamatan Pancur dengan Kantor memperhatikan perubahan dinamika pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengacu pada rencana strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Rembang 2025 serta RPJM Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Perubahan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2025 dengan mempertimbangkan aspek kemampuan anggaran, prioritas dan kebijakan pemerintah serta disusun dengan memperhatikan kaidah kaidah dalam penyusunan perencanaan dan aturan pelaksanaannya.

1.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Pancur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pancur ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2021- 2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pancur;

3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pancur ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Pancur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

1.1 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2025 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2025. Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2025.

Tidal lanjut adanya isu-isu di masyarakat Kecamatan Pancur memberikan kebijakan melangkah maju dengan

1. Mengikuti Bintek dan melatih atau mengasah kemampuan asn yang lebih baik
2. Mengatifkan ronda/jaga malam
3. Menyelenggarakan Rapat Rakor Pemerintahan yang baik dan efisien
4. Menggalakan Gotong royong untuk pembangunan desa seperti memberihkan tempat umum, bangun jalan.

Pancur, 1 Juli 2025

Plt.CAMAT PANCUR



KARTIMAN, SH. MH

NIP.19761225 201001 1 017

